

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan (Markus, 2018). Peran Pemerintah Desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan, yang dilakukan melalui pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi. Pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat, agar masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya, karena masyarakat layang lebih tahu apa yang mereka butuhkan (Susanti, 2015).

Melihat hal tersebut, penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip- prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling prospektif dalam menopang perekonomian nasional. Bukti bahwa sektor pertanian adalah sektor yang prospektif dimana kebutuhan pangan di dalam negeri dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk (Saragih, 2004).

Peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan pengembangan kepada masyarakat seperti dalam kegiatan disektor pertanian maka kontribusi yang sangat besar dalam bidang pertanian adalah aktivitas usahatani, karena itu peningkatan merupakan hal yang baru dalam membangun masyarakat terutama di bidang pertanian. Peran Pemerintah Desa seperti upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan desa melalui program dan kegiatan yang sesuai prioritas masyarakat desa belum maksimal. Keterlibatan aktif masyarakat sangat penting sehingga pemerintah harus melibatkan warga masyarakat. Namun pada kenyataannya masih banyak warga masyarakat dan petani kurang berdaya dikarenakan masalah modal, tidak bisa memanfaatkan fasilitas, dan belum mampu membuat pupuk organik (Mariana, 2020).

Hubungan pemerintah desa dan petani merupakan interaksi sosial yang menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, ataupun antara individu dengan kelompok, sehingga manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan orang lain dan juga tidak luput yang namanya hubungan antar yang lain. Dalam hidup bersama di lingkungan masyarakat perlu adanya suatu norma agar individu mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya serta dapat diterima di lingkungannya dengan baik hubungan sosial merupakan hubungan antara manusia yang saling membutuhkan. Hubungan sosial yaitu hubungan antar manusia yang menghasilkan adanya proses pengaruh dan mempengaruhi (Mu' afa, dkk, 2019).

Rasa kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika

seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai. Dari sudut pandang komunikasi, hal ini menyatakan bahwa perkembangan kepercayaan seharusnya menjadi komponen fundamental dari strategi berkomunikasi yang efektif dan efisien. Berbicara dengan data dan informasi yang akurat adalah salah satu dari prinsip komunikasi dalam Islam yang mengesankan bahwa pembawa pesan merupakan orang yang memiliki pribadi yang berkualitas, selain menambah kredibilitas, informasi yang akurat mengalir dari seorang yang berbicara atau menyampaikan pesan berujung pada penyelesaian (Yacob, 2010).

Bentuk bantuan yang didistribusikan Pemerintah Desa adalah sektor pertanian berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduk Indonesia. Namun, sektor pertanian secara umum menghadapi tantangan yang cukup besar dalam mencapai keberhasilan usaha pertanian. Permasalahan klasik yang dihadapi oleh pelaku di sektor pertanian adalah terbatasnya permodalan dalam pembiayaan usaha dalam bidang pertanian. Pembiayaan usaha tani secara umum dapat berasal dari beberapa sumber pembiayaan, seperti bank dan koperasi, lembaga keuangan mikro maupun pembiayaan dari pemerintah. Pembiayaan yang berasal dari pemerintah Indonesia pada umumnya berbentuk bantuan atau hibah yang disalurkan melalui kelompok tani dalam bentuk subsidi dan bantuan sarana produksi pertanian, seperti bibit, pupuk, dan alat panen. Adanya dukungan input produksi dan alat pertanian mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan produksi pertanian (Wulandari Dkk, 2017).

Penelitian ini merupakan hasil studi penelitian (Monica, 2024) yang mengenai peran pemerintah desa terhadap kelompok tani matuari di Desa Taunelet Kecamatan Sonder Variable yang terkait pada penelitian Monica yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Pemerintah Desa Terhadap Kelompok Tani Matuari di Desa Tounelet Satu, Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menunjukkan peran pemerintah disana di lingkungan kelompok tani menunjukkan juga respon yang baik dilihat dari peran peran pemerintah setempat dalam memajukan kelompok tani terdapat beberapa aspek yang menunjukkan peran aktif dari pemerintah setempat didalam desa tersebut : yang Pertama peran pemerintah desa dalam memajukan kelompok tani sudah terlihat; Kedua bentuk bantuan yang didistribusikan pemerintah terhadap kebutuhan kelompok petani; Ketiga hubungan baik antara pemerintah desa dan kelompok tani cukup terjalin dalam meningkatkan pada pertanian; dan Keempat yaitu rasa kepercayaan pemerintah terhadap dengan peforma dan peningkatan yang akan dicapai oleh kelompok tani. Desa Tounelet Satu memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, berjumlah 935 orang yang terdiri dari 314 kepala keluarga (KK), baik dari laki-laki memiliki jumlah 466 orang dan perempuan memiliki jumlah 469 orang, dan jumlah masyarakat yang menjadi petani sebanyak 187 Orang, untuk sampel responden yang terkait semua anggota Kelompok Tani Matuari, dengan jumlah responden 15 anggota, terdiri dari 3 pengurus dan 12 anggota.

Penelitian terdahulu yang dipaparkan oleh (Imelda, 2017) mengenai peran pemerintah desa terhadap kelompok tani Karya Lestari di desa Talikuran Satu Kecamatan Sonder, yang juga pernah diteliti ulang oleh (Monica, 2024)

dicakupkan wilayah kecamatan yang sama. Baik variabel yang terkait dengan penelitian ini adalah yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Pemerintah Desa Terhadap Kelompok Tani Karya Lestari Di Desa Talikuran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Metode penelitian yang digunakan adalah Pertama, metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya melalui survei dan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada semua anggota Kelompok Tani Karya Lestari, sedangkan data sekunder diperoleh dari lembaga yang terkait dengan penelitian yaitu pemerintah Desa Talikuran; Kedua, teknik pengambilan data dilakukan dengan mengikutsertakan semua anggota Kelompok Tani Karya Lestari, dengan jumlah responden sebanyak 15 orang yang terdiri dari Ketua, sekretaris, bendahara dan 12 orang anggota kelompok; Ketiga, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dimana metode analisis ini mendeskripsikan setiap data yang diambil untuk menarik kesimpulan untuk mengukur indikator penelitian yang digunakan dilakukan pengukuran dengan cara menguraikan indikator-indikator variabel dalam bentuk item-item pertanyaan yang disusun dalam bentuk kuesioner dengan bobot nilai (skor) jawaban 1-3, untuk membantu analisa digunakan skor dengan kategori tertentu.

Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda mengenai penelitian yang sebelumnya dan dapat di lihat dari hasil ini : Pertama, peran dari pemerintah desa terhadap kelompok tani tergolong cukup aktif dalam kegiatan pertanian dan cukup memberi masukan yang baik terhadap pemasaran tanaman yang dihasilkan di desa tersebut; Kedua sebagai wadah yang berperan

dalam mengajarkan keterampilan yang baru dan modern kepada para petani dalam meningkatkan kualitas usaha tani, juga melakukan evaluasi terhadap anggota kelompok tani yang berkembang dalam petanian dan mampu melaksanakan sebuah forum penyuluhan terhadap para anggota kelompok tani. Jumlah penduduk yang ada di Desa Talikuran Satu sebanyak 522 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 212 KK, dan untuk responden yang terkait adalah semua anggota Kelompok Tani Karya Lestari, dengan jumlah responden sebanyak 15 orang yang terdiri dari Ketua, sekretaris, bendahara dan 12 orang anggota kelompok.

Penelitian yang berbeda juga ditemukan pada penelitian (Viki, 2024) yang mengenai peran pemerintah desa dalam peningkatan masyarakat petani di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. Dimana variable yang terkait pada lingkaran masalah yang terjadi pada masyarakat petani, maka dari itu seharusnya masyarakat petani bisa mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani yang ada di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pertama, metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif untuk menggambarkan penelitian peran pemerintah desa dalam peningkatan masyarakat petani di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. metode ini mengungkapkan bahwa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan dalam hal ini adalah peran pemerintah desa dalam peningkatan masyarakat petani di desa; Kedua, teknik analisis data yang

dilakukan melalui pengolahan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian ini : Pertama, pemerintah desa berupaya mengarahkan masyarakat agar mau ikut dalam pelatihan pelatihan dengan menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana untuk mendukung kebutuhan mereka dalam bertani; Kedua, tetapi peran desa sebagai dinamisator cukup optimal dengan pemerintah melakukan pembinaan kepada masyarakat tani melalui uluran dinas pertanian dan pemerintah desa mendapatkan rancangan program ketahanan pangan untuk mendapatkan distribusi langsung yaitu: bibit tanaman, peternakan, pertanian dan sebagian bantuan modal dalam berusaha tani; Ketiga, kekurangan peran pemerintah desa untuk menjadi katalisator dinilai kurang maksimal, dimana peran pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan dan taraf hidup petani diperlukan pelatihan yang lebih intensif dan sumber bantuan modal untuk petani. Desa kertamukti Satu memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, berjumlah 6.359 orang baik dari laki-laki memiliki jumlah 5.617 orang dan perempuan memiliki jumlah 742 orang, dan jumlah masyarakat yang menjadi petani sebanyak 5.829 orang.

Beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang saling berkaitan dengan peran perangkat desa dalam meningkatkan peningkatan kepada masyarakat petani dapat dilihat perbandingannya masing – masing sebagai berikut yang pertama, berasal dari penelitian (Monica dkk, 2024) poin yang juga dapat diambil adalah respon baik yang diberikan oleh petani juga baik semua dapat terlihat dari hubungan yang terjalin dalam menjaga rasa kepercayaan yang tinggi dalam lingkungan. dengan niat baik yang ditujukan perangkat desa dalam melakukan

upaya bantuan berupa distribusi pertanian sampai dari sekarang.

Kedua juga hasil dari penelitian (Imelda dkk, 2017) poin yang dapat diambil adalah di wilayah kecamatan sonder terlihat bahwa daerah tersebut memiliki respon yang baik terhadap peran aktif pemerintah desa. dan pemerintah desa ini juga bisa bertugas sebagai wadah pengajaran ilmu yang baru mengenai pertanian mengikuti perkembangan masyarakat tani yang maju dan modern sampai sekarang.

Ketiga berasal juga dari hasil penelitian (M.viki, 2024) poin yang didapat adalah pemerintah desa sudah melakukan upaya yang cukup optimal terhadap pembinaan masyarakat petani dengan bantuan dukungan fasilitas dan prasarana yang ada sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan dan kekurangan yang ada pada perangkat desa mungkin lebih kepada pelatihan dan bantuan modal untuk kesejahteraan petani karena itu mungkin salah satu factor utama dalam meningkatkan kualitas taraf hidup petani.

Dari uraian penelitian terdahulu tersebut yang berada diatas bahwa permasalahan yang sering dihadapi oleh perangkat desa dilapangan di lingkungan masyarakat petani mungkin terkait dengan masalah sikap dari respon masyarakat petani dan masalah system yang diterapkan oleh pemerintah daerah mungkin kurang cocok dengan orientasi para petani dilapangan petani mungkin lebih terbuka dengan system yang dulu dan kurang menerima kearah sekarang ditinjau dari 6 penelitian terdahulu yang dimana penelitian terkait mendapatkan hasil yang baik dan 1 penelitian yang lainnya mendapat hasil yang kurang memuaskan di lapangan yaitu peran dari perangkat desa yang dicapai dan cukup memuaskan ada di 2 daerah yang terkait, Desa Talikuran dan Desa Taunelet.

Dimana respon petani masyarakat sangat terbantu dengan adanya campur tangan perangkat desa dalam melakukan peningkatan pada kinerja pencapaian petani dengan respon tanggapan antusias yang diberikan mungkin banyak hal yang diluar perkiraan yang terjadi lapangan tetapi menyangkut respon petani dalam bantuan, pelayanan, pelatihan, modal, prasarana dan subsidi sudah cukup dalam kebutuhan yang memang diperlukan agar menghindari penyelewengan pada indikator indikator tersebut, mungkin bantuan terkait akan terus meningkat sesuai dengan kinerja yang harus dicapai selanjutnya kedepannya dan peran petani juga sudah sesuai dengan hal yang terkait menjadi tulang punggung untuk kemajuan desa tersebut dengan menerima masukan masukan dari penyuluh pertanian maupun perangkat desa dimasing-masing desa tersebut.

Dan juga terdapat beberapa penelitian yang lain yang kurang mendapatkan hasil yang memuaskan mengenai kinerja perangkat desa tersebut yang ada di Desa Kertamukti memiliki hasil yang kurang memuaskan yaitu pelatihan dan bantuan modal yang kurang dalam membantu kesejahteraan petani sedangkan dari dukungan baik dari fasilitas dan prasarana sudah cukup optimal dalam kebutuhan yang diperlukan masyarakat petani. Saya sebagai penulis Skripsi ini akan mencoba melakukan penelitian kembali terkait untuk menguji ulang terkait judul penelitian yang sama seperti penelitian terdahulu yang ada di atas dengan melihat aspek perbedaan wilayah, populasi, kondisi petanidan hal hal yang terkait. penelitian ulang dilakukan di Desa Sempah Jaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Tanah Karo, guna melanjutkan penelitian terdahulu sebagai bahan acuan dan pengajaran pada penyelesaian Skripsi yang saya kerjakan saat ini.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pemerintah desa sebagai regulator, dinamisator, fasilitator dan katalisator terhadap peningkatan petani hortikultur yang ada di Desa Sempah jaya, kecamatan berastagi kabupaten tanah karo?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pemerintah desa sebagai regulator, dinamisator, fasilitator dan katalisator terhadap peningkatan petani hortikultur yang ada di Desa Sempah jaya, kecamatan berastagi kabupaten tanah karo ?

1.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dalam mengembangkan ilmu dan menjadi pengkajian dalam melakukan penelitian selanjutnya guna memberi manfaat yang signifikan kedepannya untuk keilmuan.
2. Di bidang akademis semoga penelitian ini menjadi menambah data yang belum sempurna bagi bagi pemerintah dalam menerapkan sistem yang baru.
3. Sebagai bahan masukan dan informasi untuk pemerintah maupun pihak lain dalam upaya untuk membuat kebijakan dalam rangka menyelesaikan masalah yang terkait di dalam masyarakat petani itu sendiri.
4. Penelitian ini diharapkan dapat membantu para petani dalam mencoba mengembangkan kinerja dari para petani kedepan guna untuk memberikan hasil yang terlihat dan bermanfaat untuk seterusnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Desa

Desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu Deshi, yang berarti tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Pengertian Desa itu sendiri adalah unit pemusatan penduduk yang bercorak agraris dan terletak relatif jauh dari kota. Desa sebagai suatu kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Di dalamnya memiliki adat istiadat tersendiri dan juga peraturan tersendiri di dalam masyarakat (Sutarjo.K, 2019).

a. Desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut merupakan suatu perwujudan atau ketampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial, seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik, dan budaya yang saling berinteraksi antarunsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Selanjutnya, Menurut (A.R.Bintarto, 2020) mengemukakan bahwa minimal ada tiga unsur utama desa, yaitu sebagai berikut:

- Daerah, dalam arti suatu kawasan perdesaan tentunya memiliki wilayah sendiri dengan berbagai aspeknya, seperti lokasi, luas wilayah, bentuk lahan, keadaan tanah, kondisi tata air, dan aspek-aspek lainnya.
- Penduduk dengan berbagai karakteristik demografis masyarakatnya, seperti jumlah penduduk, tingkat kelahiran, kematian, persebaran dan kepadatan, rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, serta kualitas penduduknya.

- Tata Kehidupan, berkaitan erat dengan adat istiadat, norma, dan karakteristik budaya lainnya.
- b. Desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa, dengan ciri-ciri antara lain memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal satu sama lain (kekeluargaan), ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan, serta cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam, seperti iklim, keadaan alam, dan kekayaan alam. Demikianlah Pengertian Desa Menurut Para Ahli dan Undang-Undang, semoga bermanfaat.

2.2. Pengertian Pengaruh

Pengaruh merupakan dorongan atau bujukan dan bersifat membentuk suatu efek sedangkan dalam teori lain peneruh adalah daya yang menyebabkan sesuatu terjadi, sesuatu yang terjadi, sesuatu yang dapat membentuk dan mengubah sesuatu yang lain dan tunduk atau mengikuti karena kuasa atau kekuasaan orang lain sedangkan Lois Gottschak mendefinisikan pengaruh sebagai suatu efek yang tegangan membentuk terhadap pikiran dan perilaku manusia baik sendiri-sendiri maupun kolektif. Berdasarkan konsep pengaruh di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu reaksi timbul (dapat berupa tindakan atau keadaan) dari suatu perlakuan akibat dorongan untuk mengubah atau membentuk suatu keadaan ke arah yang berbeda. (Babadu dkk. 2001).

2.3. Pengertian Peran

Dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar (Soerjono, 2003) memaparkan tentang teori peran yang mengatakan bahwa Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai

dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup 3 hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. setiap orang memiliki macam-macam peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan- kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan (Markus,2018).

Dalam pelaksanaannya, peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status).apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan. kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. pembedaan antara kedudukan dari peranan adalah suatu kepentingan ilmu pengetahuan keduanya tak dapat dipisah-pisahkan, oleh karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya juga demikian tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti (Soerjono.S,2003). Peranan yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat (yaitu sosial position) merupakan unsur yang statis yang menunjukkan tempat individu

dalam organisasi masyarakat. peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses (Soerjono.S 2003).

Dapat disimpulkan bahwa setiap orang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.tak jauh berbeda dengan yang dikatakan Soerjono dibukunya. berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status ini oleh Merton dinamakan perangkat peran. Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka di antara orang-orang yang memainkannya (Soerjono.S 2003).

2.4. Peran Pemerintah Desa

Peran pemerintah desa sangat penting sebagai bentuk perhatian terhadap peningkatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Menurut (Mariana, 2020), peran pemerintah desa, terhadap masyarakat dilingkungan desa dapat dilakukan dengan mengupayakan berbagai cara yang dapat memberdayakan kehidupan masyarakat petani dapat dilakukan dengan cara yaitu :

1. Penyuluhan tata cara penanaman dan perawatan tanaman.
2. Peran dalam penyediaan bibit, pupuk dan pestisida.
3. Peran dalam pemasaran hasil panen.

Sebagaimana dijelaskan juga dalam undang-undang tentang desa no 4 (empat) tahun 2014 bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep pemerintah desa sebelum terbentuk pemerintah di desa, pada awalnya desa atau yang disebut nama lain merupakan suatu wilayah dengan batas-batas tertentu yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang berdiam di wilayah tersebut dengan aturan-aturan yang disepakati, yang tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal disuatu masyarakat yang berkuasa dan memiliki wewenang mengadakan pemerintahan sendiri (Sutardjo.K, 2019).

Desa juga merupakan kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh Negara (Purnamasari , 2019). Peningkatan masyarakat desa dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan desa. pembangunan desa selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh Sari (2019). pembangunan desa bersifat multiaspek, perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar desa sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Undang Undang no 6 tahun tahun 2014 tentang desa. Pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat, agar masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya, karena

masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan (Susanti, 2015). Melihat hal tersebut, penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip- prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Menurut undang-undang nomor 6 Tahun 2014 pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.15 pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Personil satuan organisasi yang disebut pemerintah desa kecuali kelurahan itu disebut perangkat negara dan bukan perangkat atau pegawai negeri, karena beberapa pertimbangan antara lain:

1. Konsisten dengan pengertian Desa sebagai kesatuan ketatanegaraan
2. Perangkat tersebut, kendatipun pada umumnya dipilih dari kalangan masyarakat desa setempat, namun yang mengangkat adalah pejabat yang berwenang.
3. Tidak disebut sebagai perangkat atau pegawai negeri, karena kedudukan pegawai negeri diatur dengan peraturan perundang-undangan tertentu, yang tidak berlaku bagi perangkat pemerintah desa otonom.

Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan (reward) terhadap aktivitas- aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status.tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari

orang yang melakukan peran tersebut.

- Menurut (Newell,1978) yang dikutip oleh Dadang, menjelaskan bahwa peran adalah sama dengan perilaku dalam kedudukan tertentu dan mencakup perilaku itu sendiri dan sikap serta nilai yang melekat dalam perilaku.
- Menurut (Paulus Wirutomo,2013) dalam buku Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi David Berry mengatakan bahwa, Peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Dalam pandangan ini, peranan-peranan dalam pekerjaan, keluarga, kekuasaan dan peranan- peranan lain, yang diciptakan oleh masyarakat bagi manusia (Sarwito.W,2005).

Peran pemerintah sebagai penyedia kebutuhan masyarakat dan permintaan masyarakat mengenai barang dan jasa yang tidak mampu dipenuhi Karena kurang berdayanya masyarakat dalam hal saran dan prasarana, sementara dalam fungsi peningkatan dalam penelitian ini ada empat peran pemerintah yaitu:

a. Peran pemerintah sebagai regulator

Pemerintah sebagai regulator artinya bahwa pemerintah sebagai pelaksana dan penggerak masyarakat harus menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan, dengan menyiapkan dan menetapkan peraturan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan efektifitas untuk tertib dalam pengembangan dan pembangunan. Pemerintah sebagai regulator memberikan acuan dasar yang selanjutnya di pahami oleh masyarakat umum sebagai bentuk arahan untuk mengatur hal-hal yang menyangkut kegiatan pelaksanaan peningkatan masyarakat.

Proses peningkatan masyarakat demi terwujudnya pengembangan dan kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan kebijakan yang mendukung pengembangan masyarakat mengenai aturan dan mekanisme. Peran regulator kemudian dikembangkan dengan merujuk pada aspek aturan atau mekanisme. Hal ini dimaksudkan bahwa terkait dengan aturan atau mekanisme haruslah diciptakan oleh pemerintah agar menjadi sebuah patokan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan batasan-batasan setiap individu atau kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktifitasnya, sehingga aturan yang diciptakan pemerintah baik berupa kebijakan ataupun aturan lainnya diciptakan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum dan menyeluruh.

b. Peran pemerintah sebagai dinamisor

Pemerintah sebagai dinamisor merupakan sebuah usaha pemerintah dalam memberikan sebuah dorongan bagi masyarakat untuk bergerak serta ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan, dalam memelihara dan mendorong dinamika pembangunan daerah setempat. Peran pemerintah sebagai dinamisor berfungsi untuk memberikan bimbingan dan arahan yang efektif serta menyeluruh kepada masyarakat tanpa melihat adanya perbedaan ataupun strata sosial di masyarakat. Melihat kebutuhan masyarakat yang begitu besar dalam peran pemerintah maka bimbingan, arahan dan masukan dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam memelihara dinamika pemerintah di masyarakat melalui lembaga pemerintah tertentu maupun penyuluh yang bertugas di masyarakat dengan memberikan arahan bimbingan maupun pelatihan kepada masyarakat.

Selanjutnya untuk lebih mengembangkan pembahasan terkait dengan dinamisor kemudian diuraikan dalam beberapa aspek, yaitu (1) sosialisasi, (2)

pendampingan, (3) pelatihan dan (4) kunjungan lapangan. Sosialisasi yang memiliki pengertian secara umum yaitu proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Pendampingan dalam hal ini dipahami sebagai suatu kegiatan yang menempatkan tenaga yang ahli di bidang peningkatan kelompok tani yang mampu berkomunikasi, mengarahkan dan memberi motivasi kepada masyarakat. Kemudian pelatihan ialah serangkaian aktifitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan dan pengalaman bagi masyarakat. Kunjungan lapangan adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terjadwal ke suatu lokasi dengan secara langsung meninjau dan memperhatikan situasi dan kondisi dilapangan.

c. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi palaksana pembangunan atau berperan untuk menyambungkan kepentingan dari pihak pemerintah ke masyarakat begitupun sebaliknya dalam hal pengoptimalisasian kegiatan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator maka pemerintah harus menjadi agen yang mampu menciptakan dan memberi fasilitaas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan kondisi yang aman, nyaman dan terbit. Seperti menyediakan saran dan prasarana pembangunan baik sarana sumber daya alam maupun sarana bagi sumber daya manusia pada khususnya. Pemerintah juga menjadi penggerak dalam hal mendampingi melalui peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pendaan dalam memberikan modal sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diberdayakan. kemudian dengan melihat peran dari fasilitator itu sendiri tentunya memiliki tanggung jawab hingga

kewenangan dalam memperadakan segala bentuk kebutuhan untuk keberlangsungan suatu kegiatan. Dengan tersedianya bibit unggul, pupuk dan sarana produksi lainnya sudah tentu akan mendorong partisipasi dari masyarakat untuk memanfaatkannya sehingga peran dari fasilitator dalam kegiatan ini dapat lebih optimal.

d. Peran Pemerintah Desa Sebagai Katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting sebagai katalisator pembangunan tatanan masyarakat. Selain itu peran pemerintah tidak hanya mewujudkan kesejahteraan masyarakat saja, melainkan juga mewujudkan tatanan masyarakat yang baik di berbagai aspek kehidupan.

2.5. Pengertian Petani

Petani dapat diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan untuk pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia sebagai pengelola dan pengguna hasil yang ingin dicapai berupa hasil bahan pangan, bahan baku industri, maupun sumber energi, serta dalam pengelolaan lingkungan hidupnya guna memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan peralatan yang bersifat tradisional maupun modern (Richard,2004). Dalam pengertian lebih luas petani mencakup semua usaha yang dilakukan melibatkan pemanfaatan makhluk hidup termasuk tanaman, hewan, dan mikroba yang dikelola dan digunakan untuk kepentingan manusia. Sedangkan secara sederhana petani diartikan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dalam pemanfaatan lahan yang bertujuan untuk

membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim dan dapat dikonsumsi (Wikipedia, 2023).

Indonesia dengan mayoritas penduduk bekerja dan mengandalkan pertanian untuk kehidupannya memiliki beberapa bentuk pertanian yaitu :

- Pekarangan, lahan yang berada di lingkungan dalam rumah yang dimanfaatkan dan digunakan untuk ditanami tanaman pertanian seperti sayuran dan kacang-kacangan
- Sawah, kegiatan pertanian yang dilakukan dilahan basah dan memerlukan banyak air baik sawah irigasi, sawah lebak, sawah pasang surut maupun sawah tadah hujan

Tanaman Keras, jenis tanaman yang dikelola dan dikembangkan untuk kebutuhan manusia, yang termasuk tanaman keras seperti kelapa sawit, karet, coklat, durian dan banyak lagi (Artanti. H 2021).

a. Hubungan Pemerintah Desa dan Petani

Hubungan merupakan interaksi sosial yang menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, ataupun antara individu dengan kelompok, sehingga manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan orang lain dan juga tidak luput yang namanya hubungan antar yang lain. Dalam hidup bersama di lingkungan masyarakat perlu adanya suatu norma agar individu mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya serta dapat diterima di lingkungannya dengan baik hubungan sosial merupakan hubungan antara manusia yang saling membutuhkan. Hubungan memiliki beberapa kriteria bahwa baik tidaknya hubungan sosial antara individu yang satu dengan yang lain dapat dilihat dari beberapa segi yaitu (Walgito, 2010) yaitu frekuensi hubungan,

intensitas hubungan dan populasi hubungan. Hubungan peranan didalam suatu kelompok bisa dimainkan setiap waktu oleh pemimpin anggota maupun anggota didalam kelompok.

Pemimpin kelompok tani disini memiliki peran yang sangat penting didalam kelompok yaitu sebagai coordinator kelompok, dimana mereka yang menjelaskan atau menunjukkan hubungan antara berbagai pendapat serta saran, sementara disisi lain setiap anggota berhak memainkan lebih dari satu peran dalam partisipasi kelompok. Dilain hal pemimpin kelompok bisa menjadi suatu penggerak didalam bertindak atau mengambil keputusan dan berusaha untuk merangsang suatu kelompok agar tetap melakukan suatu kegiatan yang sudah ditentukan sebelumnya. Meningkatnya suatu partisipasi kelompok akan memunculkan peningkatan kedinamisan kelompok. kedinamisan kelompok inilah yang akan membuat peluang sebesar-besarnya kepada anggota kelompok untuk bekerjasama dan berpartisipasi dalam memajukan suatu kelompok yang membuat tujuan yang dibuat tercapai. Kelompok tani yang dinamis ditandai dengan adanya interaksi didalam kelompok baik itu keluar maupun kedalam guna mencapai tujuan kelompok (Soetomo,2006).

2.6. Pengertian Kelompok Tani

Kelompok tani minimal mempunyai kepengurusan dimulai dari ketua, sekretaris dan bendahara kelompok yang dipilih oleh masyarakat tani. Kelompok tani harus diketahui dan disahkan oleh pihak pemerintah setempat baik tingkat desa atau kelurahan setempat (Anton.A, 2007). Adanya kelompok tani, para petani dapat bersama-sama memecahkan permasalahan yang antara lain berupa pemenuhan sarana produksi, teknis produksi dan pemasaran hasil. Melihat potensi

tersebut, maka kelompok tani perlu dibina dan diberdayakan lebih lanjut agar dapat berkembang secara optimal (Anton.A, 2007).

1) Fungsi kelompok tani

Menurut (Soedijanto, 1996) agar kelompok tani dapat berkembang secara dinamis, maka harus dikembangkan jenis-jenis fungsi kelompok tani yang juga merupakan fungsi dari kelompok tani, yang terdiri dari :

- Fungsi kelompok dalam mencari dan menyebarkan informasi kepada anggota.
- Fungsi kelompok dalam pengadaan fasilitas dan sarana produksi.
- Fungsi kelompok tani dalam merencanakan kegiatan kelompok.
- Fungsi kelompok dalam penerapan teknologi panca usaha kepada para anggota.

2) Kemampuan kelompok tani

Kemampuan kelompok tani dibentuk berdasarkan surat keputusan SK Mentan No.41/Kpts/OT/210/1992 dan dimaksudkan sebagai wadah komunikasi. Menurut (Wahyuni, 2003) petani, serta antara petani dengan kelembagaan terkait dalam proses alih teknologi. Kinerja tersebut akan menentukan tingkat kemampuan kelompok tapi usia kelompok tidak menjamin kinerja kelompok tani. Kelompok yang sudah mencapai tingkat madya dan berusia tua sudah tidak dinamis lagi malahan mengarah ke kelompok yang tidak efektif.

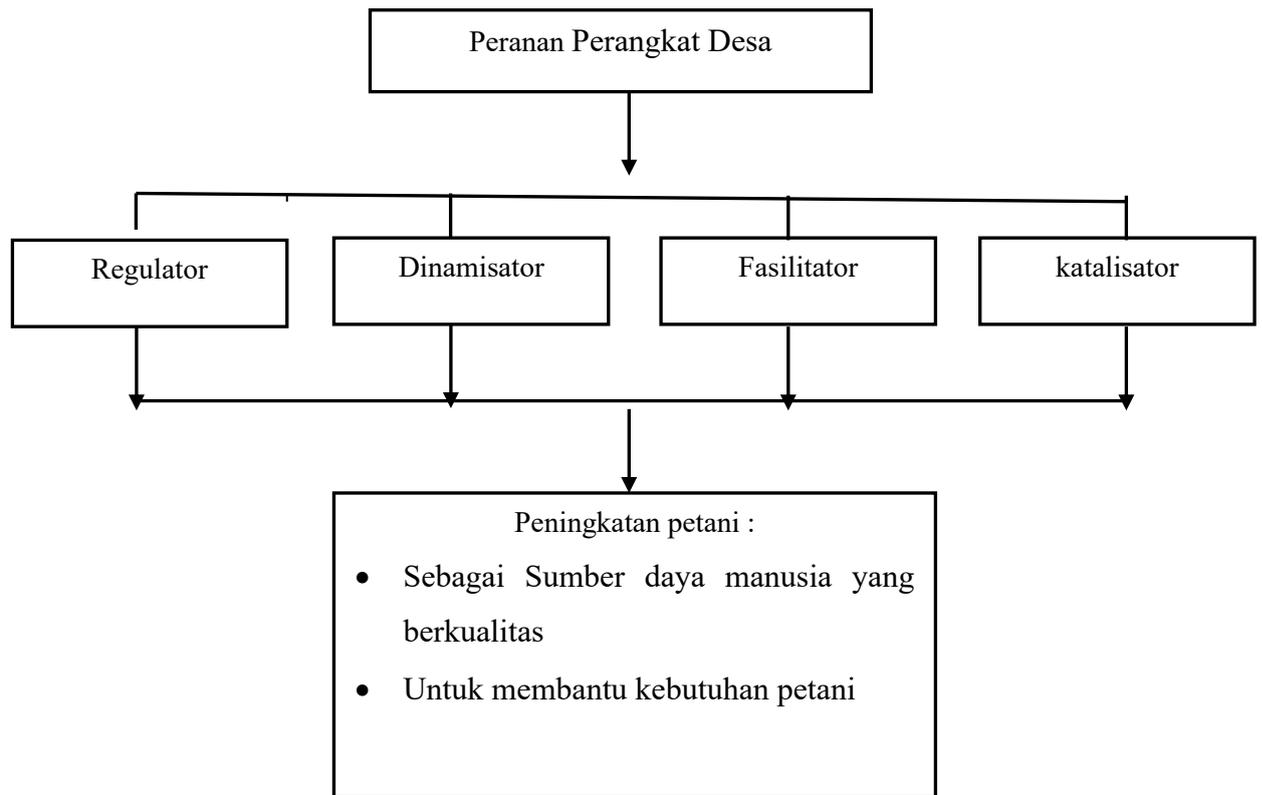
Berdasarkan tingkat kemampuan kelompok tani, dikenal lima indikator kemampuan kelompok tani dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- Mencari dan menyebarluaskan informasi.
- Merencanakan kegiatan kelompok tani.

- Melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah.
- Penerapan teknologi para usahatani
- Penyediaan fasilitas dan sarana produksi.

2.7. Kerangka Pemikiran

Peran pemerintah dalam peningkatan masyarakat merupakan langkah yang di ciptakan pemerintah dalam memberikan kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk konsep pemikiran yang di tuangkan serta pelaksanaannya di tengah masyarakat. Untuk melihat peran pemerintah dalam peningkatan masyarakat pada kelompok tani dapat dilihat melalui empat indikator yaitu sebagai regulator dimana didalamnya terdapat aturan mendasar tentang mekanisme peningkatan serta bejikan yang dikeluarkan pemerintah untuk peningkatan masyarakat, pemerintah sebagai dinamisator didalam di dalamnya terdapat peran pemerinath dalam melakukan sosialisasi, pendampingan, pelatihan dan kunjungan lapangan, kemudian indikator ketiga pemerintah sebagai fasilitator dimana di dalamnya terdapat peran pemerintah dalam hal pengadaan bibit unggul, pengadaan pupuk, pestisida dan sarana produksi untuk peningkatan petani, indikator keempat pemerintah sebagai katalisator yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi pemerintah memiliki peran yang sangat penting sebagai katalisator pembangunan tatanan masyarakat. Maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar berikut :



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran

Peran pemerintah yang dilakukan di Desa Sempah Jaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Tanah Karo merupakan bentuk kerja pemerintah untuk memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam hal pertanian, dan pemerintah juga berperan penting dalam menerbitkan aturan yang mendasar untuk menjadikan pola umum dalam mencapai tingkat kesejahteraan petani khususnya kelompok tani serta menjadi motor penggerak bagi seluruh lapisan masyarakat baik tingkat regional maupun tingkat pusat untuk bekerjasama dalam mewujudkan pengembangan dan peningkatan masyarakat khususnya pada kelompok tani

A. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk melihat peran pemerintah dalam peningkatan masyarakat pada kelompok tani melalui empat indikator dapat dilihat sebagai berikut:

a) Regulator

1. kebijakan pemerintah

b) Dinamisator

1. Sosialisasi
2. Pendampingan
3. Pelatihan

c) Fasilitator

1. Penyedia bibit unggul
2. Pupuk dan pestisida
3. Sarana produksi

d) Katalisator

1. Pengembangan potensi
2. Membangun partisipasi

B. Deskripsi fokus penelitian

Berdasarkan dari kerangka fikir yang terdapat diatas maka dapat kita temukan deskripsi fokus sebagai brikut:

1. Peran pemerintah dalam melakukan peningkatan masyarakat khususnya pada petani harus aktif dan berkesinambungan, peran sebagai pelaksana kebijakan harus mampu melakukukan empat fungsi utama yaitu regulator, dinamisator fasilitator dan katalisator.
2. Pemerintah sebagai regulator, merupakan dasar aturan berlaku yang disiapkan pemerintah untuk mengatur setisap pelaksanaan peningkatan masyarakat.

3. Peran pemerintah sebagai Dinamisator adalah untuk memberikan arahan dan bimbingan melalui pendampingan kepada masyarakat sehingga dengan adanya bimbingan maka masyarakat lebih berdaya guna.
4. Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah untuk memperadakan fasilitas yang di butuhkan masyarakat baik saran dan prasarana untuk kebutuhan peningkatan seperti bibit, pupuk dan alat-alat pengolahan lainnya.
5. Peran pemerintah sebagai katalisator adalah agen yang mempercepat pengembangan potensi yang ada di masyarakat guna membangun tatanan kehidupan yang baik dalam aspek kehidupan yang merata sehingga menjadi masyarakat yang unggul.
6. Pengembangan petani yang dimaksud adalah adanya sebuah dorongan dan perubahan baru yang dilakukan hasil dari hubungan kerja sama pemerintah dan masyarakat.

C. Aspek peran pemerintah desa.

Dilihat dari peran pemerintah dalam memajukan petani yaitu :

1. Peran pemerintah desa dalam memajukan petani di Desa sempah jaya.
2. Pengaruh pemerintah desa sebagai regulator, dinamisator, fasilitator dan katalisator terhadap peningkatan petani holtikultur
3. Hubungan Antara pemerintah desa dengan petani di Desa sempah jaya